

# KETELADANAN DAMBAAN UMAT

Oleh : Drs.H.A. Hamdan, M.M.

Pasca reformasi birokrasi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan UUD 45, dengan demikian keteladanan PNS menjadi dambaan umat manusia.

Berdasarkan UU Nomor 43 th 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa “Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-esarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.

Sejalan dengan bunyi Undang-undang tersebut di atas, Kepala BKD Hj. Titin Sulastri, SH, Sp1 pada tanggal 1 Maret 2006 menyelenggarakan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III bertempat di BBAT yang dibuka secara resmi oleh Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH.,M.Si.

Hadir dalam kesempatan itu Sekda Kota Sukabumi H. Mohamad Muraz, SH., MM., dan beberapa Kepala Dinas Instansi yang kebetulan stafnya menjadi peserta latihan prajabatan angkatan ke 1 di tahun 2006. Karena pesertanya kebanyakan dari tenaga kependidikan, Walikota Sukabumi meminta kepada Kepala BKD agar Kepala Dinas P dan K Kota Sukabumi Drs. Mulyono, MM., diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang berhubungan langsung dengan peningkatan profesi seorang guru.

Usai melaksanakan peresmian pembukaan prajabatan, Walikota yang diberi julukan oleh Prof. Mohamad Surya ”*dipikanyaah ku guru*” karena selalu konsen terhadap pendidikan, langsung menuju ke Kampung Garung Kecamatan Gunung Puyuh untuk melaksanakan peresmian penggunaan Gedung Baru MI yang dibangun oleh APJ PLN Sukabumi.

Sikap keteladanan Kepala APJ PLN Budhi dalam memberikan dana pembangunan kembali MI yang roboh di Kp Garung itu diharapkan akan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, karena justru dengan pendidikan akan memberikan multiplier effect terhadap peningkatan IPM pada tataran 80 point di tahun 2008.

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si. menjelaskan bahwa tanggung jawab pembinaan dan penyediaan sarana peningkatan keagamaan ada dibawah naungan Depag dan masalah Keagamaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak diserahkan kepada Daerah, namun Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah mempunyai komitmen bahwa antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah disnergiskan dengan rumus 1,3,6,16,11.

Bahkan Program Pusat tentang pemberian Sumbangan Langsung Tunai (SLT) dikomandokan langsung oleh Walikota dalam penyalurannya, hal ini seperti nampak dalam rapat persiapan penyerahan SLT di ruang pertemuan Setda Kota Sukabumi tanggal 3 Maret 2006, Pemerintah Daerah menyiapkan dana untuk pengamanan dan sewa tenda serta dana operasional RT/RW yang terlibat langsung dalam memperlancar penyaluran SLT di Kota Sukabumi.

Dari beberapa aktivitas yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi, ternyata telah mampu memberikan daya tarik bagi Kabupaten/Kota lain untuk berkunjung ke Kota Sukabumi, diantaranya DPRD Kabupaten Palopo telah melakukan Kunjungan Kerja pada tanggal 4 Maret 2006 yang diterima secara langsung oleh Sekda Kota Sukabumi H. Mohamad Muraz, SH., M.Si., di ops. room.

Sejalan dengan beberapa program yang berhubungan langsung terhadap peningkatan SDM, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia Cabang Kota Sukabumi (GOP TKI) yang saat ini Ketuanya Hj. Esih Muraz, pada tanggal 6 Maret 2006 melakukan Rapat Gabungan bertempat di Ruang Pertemuan.

Kegiatan rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi para Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PADU), dengan harapan sejak usia dini sudah tumbuh keinginan untuk belajar menimba ilmu, karena menurut peribahasa “belajar diwaktu kecil bagai mengukir diatas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir diatas air”

Masih berhubungan dengan upaya peningkatan sikap keteladanan yang dikenal dengan Tri Brata Bayangkara, pada tanggal 6 Maret telah dilaksanakan upacara penerimaan siswa Secapa POLRI oleh Walikota Sukabumi bertempat di Lapangan Secapa POLRI, upacara ini selalu dilakukan sebagai sikap kebersamaan masyarakat Kota Sukabumi dengan POLRI, karena sejak jaman Belanda Sekolah Polisi di Kota Sukabumi sudah berdiri dan merupakan kebanggaan orang Sukabumi.

Keberadaan Secapa telah memberi warna pula terhadap perkembangan olah raga prestasi, termasuk di dalamnya cabang Yudo banyak dilahirkan dari hasil didikan Perwira Secapa POLRI, seperti halnya atlit Yudo Aimi hasil didikan pak Sodik dan Pak Winardi, bahkan pada tanggal 7 Maret telah dilaksanakan pengukuhan Kontingen Porprop X di Gedung Juang 45.

Bagi warga Kota Sukabumi tidak terlalu susah untuk mencari sosok orang tua ideal yang bisa diteladani, diantaranya Mang Ihin yang pernah menjadi Gubernur Jawa Barat dan pernah menjadi Sesdalopbang di Negara RI, yang sampai saat ini masih terus berkiprah di Kota Sukabumi, tepatnya di Situ Endah Kelurahan Lembur Situ Kota Sukabumi mengembangkan tanaman padi ramah lingkungan dengan sistim SRI dengan pupuk organik.

Dari sikap keteladanannya itu sempat menarik perhatian Komisi IV DPR dan Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat untuk bersama-sama melaksanakan ubinan panen raya padi dengan pola SRI tanpa pupuk unorganik pada tanggal 9 Maret 2006 yang dihadiri pula oleh Walikota Sukabumi H. Mokh Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si., dengan Bupati Sukabumi Drs. H. Sukmawidjaya, MM.

Dijelaskan oleh Walikota bahwa salah satu program PPK yang dikembangkan di Kota Sukabumi diantaranya keterpaduan pengembangan peternakan dengan pertanian serta kebersihan, didalamnya ada pengembangan komposting di TPA Cikundul. Hal ini sejalan dengan pola SRI yang menggunakan pupuk organik sebagai nutrisi bagi tanaman padi.

Ternya dengan pola SRI batang padi yang ditanam dari satu biji, selama satu bulan setiap rumpunnya mencapai 30 batang, selain itu bahwa biji padi disaat berbuah semuanya berisi sampai ke ujung. Dengan demikian Mang Ihin berharap agar pola SRI ini dikembangkan oleh para petani dengan dukungan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian Jawa Barat secara aktif mensosialisasikan pola SRI, seperti yang telah dikembangkan di Kabupaen Tasikmalaya dan Ciamis

Lebih lanjut dikatakan Walikota Sukabumi, seluruh bidang tanah yang belum berubah fungsi menjadi infrastruktur perkotaan hendaknya dimanfaatkan dan dikelola untuk lahan pertanian yang efektif dengan pola SRI. Walaupun sektor pertanian bukan merupakan Visi Kota Sukabumi, tetapi sektor pertanian tetap harus mendapat perhatian . seperti yang dicontohkan oleh Mang Ihin untuk mengembangkan pola SRI.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.